

DAFTAR PUSTAKA

- A. W., & Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, H. (2020). Implementasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Aminah, S. (2022). Pelayanan Puskesmas Barombong. *Pemkot Makassar*.
- Anderson, J. (1979). *Public Policy Making*. New York: Rinehart and Winston.
- Armistead, & Clark. (1999). Layanan dan Dukungan kepada Pelanggan: Penerapan Strategi yang Efektif. *M. K. Djunaedi, Trans*.
- Azwar, A. (1996). *Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga*. Jakarta.
- Bakhtiar, A. A. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Doctoral Dissertation*.
- Irmawati, S., M., H. S., & Nurhannis. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Urara Kecamatan Tatanga Kota Palu. *Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*.
- Kasim, d. (2018). Evaluasi Program Layanan Home Care Di Wilayah Kerja Puskesmas Batua Kota Makassar Tahun 2018. *Universitas Muslim Indonesia*.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004.

- Lalla, N. S. (2022). Pelayanan Home Care Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Derajat. *Abdimas Polsaka*.
- Ma'mur, Wahidin, & Ahmad, M. S. (2019). Evaluasi Program Home Care Pada Puskesmas Barabaraya. *Jurnal Administrasi Negara*, 213.
- Mubarak, & N, C. (2009). *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nopiati, & Sasmito, C. (2019). Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas. *Ilmu Manajemen dan Akuntansi*.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy : Dinamika Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang pelayanan kunjungan rumah 24 jam (*Home Care*) di Kota Makassar.
- Sanah, N. (2017). Pelaksanaan Fungsi Puskesmas. *eJournal Ilmu Pemerintahan*.
- Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). *Pustaka Pelajar*.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulbanir. (2021). Implementasi Program Home Care (Dottorotta) Saat Pandemi COVID-19 di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.

- Suprpto. (2018). 'Efektivitas Penggunaan Layanan Home Care dalam Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Barombong kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*.
- Suprianto. (2014). Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. *Jom FISIP*.
- Syarif, L. O. (2012). *Asuhan Keperawatan Gerontik Berstandartkan Nanda, NIC, dan NOC Dilengkapi Teori dan Contoh Kasus Askep*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia Jakarta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Witaradya, K. (2010). Implementasi Kebijakan Model C G Edward III.
- Wowor, H., Liando, D. M., & Rares, J. (2016). Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*.
- Yuliansyah, D. (2019). Studi Kualitas Pelayanan Home Care. *Universitas Muslim Indonesia*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telepon (0411) 585024 Fax (0411) 585024 Laman w w w. fisip.unhas.ac.id										
Nomor : 3992/UN4.8.1/ PT.01.04/2023	7 Juni 2023										
Lamp. :											
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Wawancara											
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Provinsi Sulawesi Selatan											
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini : <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">N a m a</td><td>: Dzikra Amanda</td></tr><tr><td>Nomor Pokok</td><td>: E051201047</td></tr><tr><td>Departemen</td><td>: Ilmu Pemerintahan</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: Sudiang Makassar</td></tr><tr><td>Nomor Hp.</td><td>: 081357591331</td></tr></table> Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepuustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "ANALISIS PELAKSANAAN KEBIYAKAN PERWALI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN HOME CARE DI PUSKESMAS BAROMBONG KOTA MAKASSAR" Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. a n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,  Dr. Hasniati, S.Sos. M.Si. NIP. 196801011997022001  Tembusan : 1. Dekan Fisip Unhas 2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan 3. Kassubbag. Akademik 4. Pertinggal. 		N a m a	: Dzikra Amanda	Nomor Pokok	: E051201047	Departemen	: Ilmu Pemerintahan	Alamat	: Sudiang Makassar	Nomor Hp.	: 081357591331
N a m a	: Dzikra Amanda										
Nomor Pokok	: E051201047										
Departemen	: Ilmu Pemerintahan										
Alamat	: Sudiang Makassar										
Nomor Hp.	: 081357591331										



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **25839/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3992/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **DZIKRA AMANDA**
Nomor Pokok : **E051201047**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERWALI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN HOME CARE DI PUSKESMAS BAROMBONG KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 September s/d 18 Oktober 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassar.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/439/SKP/SB/DPMTSP/9/2023

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/439/SKP/SB/DPMTSP/9/2023, Tanggal 13 September 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 443/SKP/RekoTeknis/9/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	DZIKRA AMANDA
NIM / Jurusan	:	E051201047 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,
Waktu Penelitian	:	18 September 2023 - 18 Oktober 2023
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	"ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERWALI NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN HOME CARE DI PUSKESMAS BAROMBONG KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-09-18 13:11:40



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar

No : 440/115/PSDK/IX/2023

Lamp : -

Perihal : Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Puskesmas Barombong

Di -

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/343/SKP/DPMPTSP/9/2023 tanggal 14 September 2023, maka bersama ini di sampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **Dzikra Amanda**
NIM : E051201047
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan
Institusi :
Tanggal Penelitian : 18 September 2023 s/d 18 Oktober 2023
Judul : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perwali n0 6 Tahun 2016 tentang Layanan Home Care di Puskesmas Barombong Kota Makassar

Akan melaksanakan kegiatan persiapan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin.

Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 18 September 2023
Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar

dr. Nursalati Sirajuddin, M.Kes
Pangkat : Pembina TK I/IV B
NIP : 19730112 2006042012

DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
JL. TEDUH BERSINAR NO.1 Tlp (0411) 881549
FAX. (0411) 887710

Amil data an jmlr.

Surat dari :	PTSP	Diterima :	26-09-23
Tanggal :	18-09-23	Nomor :	4127
Nomor Surat :		Diteruskan Kepada :	

ISI Disposisi

1. Untuk diketahui seperlunya/diarsipkan
2. Untuk dipelajari
3. Untuk ditanggapi
4. Untuk ditindaklanjuti
5. Untuk menghadiri

l 24/9/23.

I. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

1. Subag Umum dan Kepegawaian
2. Subag Keuangan
3. Subag Perencanaan dan Pelaporan

II. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu

III. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Seksi Kefarmasian
2. Seksi Alat Kesehatan Perbekalan Kesehatan & Jaminan Kesehatan
3. Seksi SDM Kesehatan dan Registrasi Kesehatan

IV. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT

1. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular
2. Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Keswa
3. Seksi Surveilans dan Imunisasi

V. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga

VI. SEKRETARIS KORPRI

Lampiran 2 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS KESEHATAN Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN <u>No surat : 440 /235/PSDK /IV/2023</u>	
Bersama dengan surat ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Dzikra Amanda
NIM	: E051201047
Jurusan	: S1 Ilmu Pemerintahan
Institut	: Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar
Judul	: Analisis Pelaksanaan kebijakan PERWALI no 6 tahun 2016 Tentang layanan Home Care di Puskesmas Barombong Kota Makassar
Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di kantor Dinas kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulawesi selatan, pada tanggal 18 September 2023 sampai Dengan 18 Oktober 2023	
Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Makassar, 24 Oktober 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar	
 Dr. Nursaidah Sirajuddin, M.kes Pangkat : Pembina TK I / IV B NIP : 19730112 2006042012	



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BAROMBONG

Perjanjian Bungaya No. 13 Barombong, Makassar, Kode Pos : 90221
Email : adminpkmbarombong@gmail.com



SURAT TUGAS KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepada Puskesmas Barombong Kecamatan Tamalate Kelurahan Barombong Kota Makassar, Menerangkan bahwa :

Nama : Dzikra Amanda
NIM : E051201047
Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di wilayah Puskesmas Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar Selama 14 hari pada bulan Oktober Tahun 2023, dengan judul penelitian "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perwali no 6 tahun 2016 Tentang Layanan Home Care di Puskesmas Barombong Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

A/n. Kepala Puskesmas Barombong

Plt KTU



Djuniali, SKM

Nip. 19680612 198803 2 011

Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara

Matriks 5.1 Pertanyaan-Pertanyaan Yang Diajukan Saat Wawancara

Informan Penelitian	Indikator	Pertanyaan
1	2	3
1. Dinas Kesehatan dan Tim <i>Home Care</i> Puskesmas Barombong Kota Makassar	Mendasar	1. Apa definisi atau makna “Pelayanan Kesehatan” khususnya tentang layanan “ <i>Home Care</i> ”?
		2. Boleh diceritakan secara singkat sejarah Kebijakan Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2016 Tentang Layanan <i>Home Care</i> ? - Apa yang melatarbelakangi kebijakan ini dibentuk? - Apa tujuan utama kebijakan ini dibentuk?
	Komunikasi	1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan Puskesmas dalam pelaksanaan program <i>Home care</i> ?
		2. Seberapa rutin Dinas Kesehatan mensosialisasikan kebijakan layanan <i>Home Care</i> ini kepada masyarakat? - Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi selama melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?
		3. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat? (<i>Untuk pertemuan langsung (tatap muka) + Saluran lainnya (Spanduk, Media sosial)</i>) - Apakah masih aktif? - Apakah hal ini mudah diakses informasinya oleh masyarakat?
		4. Dalam melakukan sosialisasi kebijakan, siapa saja yang terlibat dan terjun langsung ke lapangan untuk menyampaikan? - Apakah ada tim khusus yang dibentuk? - Pada saat apa saja pemerintah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini? - Adakah waktu/momen tertentu yang dikhususkan? (<i>Seperti Hari Kesehatan dll</i>)

1	2	3
		5. Apakah masyarakat secara keseluruhan telah mengetahui terkait kebijakan ini dan apakah informasi sudah tersampaikan dengan baik? - Jika belum, apa yang mempengaruhi dan perlu dibenahi?
		6. Apakah sejauh ini pelaksanaan pelayanan kesehatan Home Care tetap konsisten hingga saat ini?
	Sumber Daya	1. Apakah terdapat struktur keorganisasian untuk SDM yang menangani/bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini? (Minta struktur) - Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam hal kualitas SDM?
		2. Apakah SDM yang menangani dinilai berkompeten? (Jika ditinjau dari latar belakang keilmuan atau kompetensi berdasarkan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti). (Sebutkan jika ada) + Minta List: (Nama Lengkap Pegawai, Golongan dan Jabatan, Latar belakang keilmuan, serta Apa yang dikerja/tugas, kewenangannya, atau pembagian tugasnya) Termasuk tim teknis (dan tanyakan apakah orang-orang ini pegawai DPPPA).
		3. Apakah jumlah SDM yang ada ini dinilai ideal/cukup membantu dalam pelaksanaan kebijakan ataukah secara kuantitas perlu penambahan atau pengurangan? - Bagaimana jumlah tim teknis?
		4. Apakah pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas pendanaan dalam APBD? - Berapa jumlah atau persentasenya dari keseluruhan APBD? (Minta rinciannya) - Selain dari APBD, darimana saja sumber pendanaan kebijakan layanan Home Care?
		5. Dari keseluruhan anggaran yang telah disediakan, rinciannya diperuntukkan untuk apa saja? (Minta daftar seperti pengadaan fasilitas dll) - Apakah terdapat pemotongan/pengalihgunaan anggaran? - Apakah berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan?

1	2	3
		6. Apa saja sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan layanan <i>Home Care</i>? (<i>Minta list nama, jumlah, lokasi, dan kondisi</i>) baik yang ada di kantor/lapangan. - Sarana dan prasarana apa saja yang masih dibutuhkan oleh pemerintah? (<i>Dilihat dari kuantitasnya masih kurang</i>)
		7. Apakah dilakukan pemeliharaan/perawatan terhadap sarana dan prasarana? - Seberapa sering dilakukan? - Adakah tim pengelola yang ditugaskan? - Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana?
	Disposisi	1. Apakah pegawai telah memiliki informasi dan pemahaman yang cukup terhadap kebijakan ini? - Apakah bapak/ibu sebagai pimpinan selalu memberikan arahan/motivasi kepada bawahan/tim pelaksana? - Seberapa sering ibu memberikan pengarahan? - Apa saja yang disampaikan saat pengarahan?
		2. Apakah perintah yang diberikan kepada tim pelaksana di lapangan dilakukan secara konsisten dan jelas ataukah perintah yang diberikan sering berubah-ubah? (<i>Berikan contoh</i>). - Apakah keseluruhan bawahan sudah berinisiatif sendiri melaksanakan tugasnya ataukah masih menunggu perintah bapak/ibu sebagai pimpinan?
		3. Ketika bawahan/tim pelaksana tidak mengerjakan tugasnya dengan baik di lapangan, langkah awal apa yang ibu lakukan? - Apakah ada pemberian sanksi khusus apabila bawahan/tim pelaksana bersikap semena-mena atau mengabaikan tugasnya? - Bagaimana langkah responsif dan antisipatif bapak/ibu ambil ketika ada

1	2	3
		kendala/hambatan yang terjadi di lapangan? - Apakah terdapat pemberian insentif atau <i>reward</i> sebagai penghargaan terhadap kinerja/keberhasilan tim pelaksana kebijakan?
		4. Bagaimana bentuk pengawasan bapak/ibu sebagai pimpinan kepada bawahan terhadap pelaksanaan di lapangan? - Setelah melihat/meninjau pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah bapak/ibu sebagai pimpinan rutin melaksanakan evaluasi dan mendengarkan pendapat maupun masukan agar pelaksanaannya berjalan lebih baik?
		5. Bagaimana bapak/ibu menilai Pelaksanaan Kebijakan Perwali No. 6 Tahun 2016 Tentang layanan Home Care di Kota Makassar sejauh ini? - Apa saja yang masih perlu untuk dibenahi? <i>(termasuk dalam hal teknis)</i>
	Struktur Birokrasi	1. Siapa atau organisasi apa saja yang terlibat sebagai stakeholder dalam kebijakan ini? - Jika ada apa saja tugasnya? - Bagaimana jalur koordinasi dan kerjasama keseluruhan stakeholder tersebut? <i>(Minta digambarkan garis koordinasinya)</i>
		2. Bagaimana bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian) dan Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) terkait pelaksanaan kebijakan ini?
		3. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan kebijakan ini? Kapan dan siapa yang berwenang dalam pembuatan SOP ini? - Apa saja yang tercantum dalam SOP? <i>(Minta SOPnya)</i>
		4. Apakah seluruh staf/tim teknis di lapangan telah memahami isi dari SOP? - Apakah dalam menjalankan kebijakan ini selalu berpedoman pada SOP yang ada? - Dalam praktiknya, apakah SOP ini dinilai memudahkan ataukah masih berbelit-belit? - Selain itu, bagaimana alur pelayanan pengaduan/laporan bagi masyarakat?

1	2	3
		5. Apakah kebijakan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan hanya dijalankan oleh Dinas Kesehatan atau dalam lingkup/sasaran tertentu ditugaskan kepada dinas lain? (<i>Misalnya dinas sosial</i>)
2. Masyarakat Barombong	Mendasar	1. Bagaimana bapak/ibu mengetahui ada program pelayanan Home Care (Kunjungan 24 jam) di Kota Makassar?
	Komunikasi	1. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi langsung oleh pemerintah (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah setempat) mengenai program layanan Home Care? 2. Apakah bapak/ibu diberikan penjelasan dengan baik oleh tim Home Care selama pelayanan?
	Sumber Daya	1. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas para dokter/perawat dalam memberikan pelayanan Home Care? 2. Apakah saat menerima pelayanan alat dan prasarana tim Home Care lengkap atau ada yang tidak memadai?
	Disposisi	1. Apakah bapak/ibu melakukan komitmen dengan tim Home Care sebelum mendapatkan pelayanan? 2. Apakah layanan Home Care yang bapak/ibu terima ini gratis atau memungut biaya?
	Struktur Birokrasi	1. Menurut bapak/ibu apakah program Home Care ini sangat membantu dalam pemberian pelayanan kesehatan? 2. Bagaimanakah kualitas pelayanan yang bapak/ibu terima dari tim Home Care? 3. Pelayanan seperti apa yang bapak/ibu perlukan saat menggunakan pelayanan Home Care ini? 4. Apakah dalam mendapatkan pelayanan bapak/ibu menunggu lama? 5. Apakah bapak/ibu mendukung adanya program ini? 6. Apakah saran dan masukan bapak/ibu untuk program layanan Home Care?

Lampiran 4 Dokumentasi



